

Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan Melalui Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Mesuji

Kunkun Heriyansyah¹, Aspa Magenda², Yuyun Yuniarti³

¹Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, Lampung, ²Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, Lampung, ³Universitas Pasundan, Bandung

Email: kunshah03@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendorong pembangunan daerah, yang salah satunya tercermin melalui capaian indeks pendidikan. Kabupaten Mesuji masih menghadapi tantangan rendahnya indeks pendidikan akibat keterbatasan akses dan keberlanjutan pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan diposisikan sebagai alternatif strategis untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan indeks pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mesuji. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan kuesioner pendukung. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang diperkuat dengan analisis SWOT menggunakan matriks IFAS dan EFAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya kompetensi tutor, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Meskipun demikian, terdapat peluang pengembangan melalui dukungan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan keberadaan lembaga pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran pendidikan kesetaraan dalam meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Mesuji.

Kata Kunci: Indeks Pendidikan, Pendidikan Kesetaraan, Strategi Kebijakan, Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

Improving the quality of human resources is a fundamental requirement for regional development, which is reflected, among others, in the achievement of the education index. Mesuji Regency continues to experience relatively low educational outcomes due to limited access and continuity in formal education. Equivalency education serves as a strategic alternative to expand learning opportunities for communities unable to complete formal schooling. This study aims to analyze strategies for improving the education index through equivalency education programs in Mesuji Regency. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, document analysis, and supporting questionnaires. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing, strengthened by a SWOT analysis using IFAS and EFAS matrices. The findings indicate that the implementation of equivalency education faces several challenges, including limited funding, low community participation, insufficient tutor capacity, and weak monitoring and evaluation mechanisms. Nevertheless, opportunities exist through supportive regulations, community demand, and the availability of local equivalency education institutions. Therefore,

integrated and sustainable strategies are required to strengthen the role of equivalency education in enhancing the education index in Mesuji Regency.

Keywords: *Education Index, Equivalency Education, Policy Strategy, Human Development.*

Latar Belakang Masalah

Pembangunan sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam mewujudkan kemajuan suatu daerah. Kualitas manusia yang unggul tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat (Winters, 2011). Pendidikan berperan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas individu, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan manusia secara umum diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian pembangunan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Coccia & Bellitto, 2018). Dimensi pendidikan menjadi salah satu komponen krusial karena berkaitan langsung dengan kemampuan dasar masyarakat dalam mengakses pengetahuan, keterampilan, dan inovasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pendidikan antara lain Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menggambarkan peluang dan capaian aktual masyarakat dalam menempuh pendidikan formal (Ganguly et al., 2019).

Dalam konteks Kabupaten Mesuji, capaian IPM masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh lemahnya capaian pada dimensi pendidikan. Nilai HLS dan RLS yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum mampu menyelesaikan pendidikan secara optimal, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, dan keberlanjutan pendidikan di wilayah tersebut. Permasalahan pendidikan di Kabupaten Mesuji tidak hanya tercermin dari rendahnya capaian lama sekolah, tetapi juga diperkuat oleh tingginya angka anak tidak sekolah, putus sekolah, serta lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi geografis wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, faktor sosial ekonomi keluarga, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi faktor yang saling berkaitan dan memperburuk situasi tersebut. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara sistematis, maka akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah (Anlimachie & Avoada, 2020).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pendidikan nonformal khususnya pendidikan kesetaraan memiliki peran strategis sebagai alternatif dan pelengkap pendidikan formal (Mahu et al., 2025). Program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal. Fleksibilitas waktu, metode pembelajaran, serta pendekatan berbasis kebutuhan peserta didik menjadikan pendidikan kesetaraan sebagai instrumen potensial dalam meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, terutama bagi penduduk usia di atas 15 tahun. Meskipun demikian, implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mesuji masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, kualitas tutor yang belum merata, serta belum optimalnya dukungan

kebijakan dan kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi pendidikan kesetaraan terhadap peningkatan indeks pendidikan belum mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu strategi kebijakan yang komprehensif dan terarah dalam rangka mengoptimalkan peran pendidikan kesetaraan sebagai instrumen peningkatan indeks pendidikan. Strategi tersebut harus mampu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang realistis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi peningkatan indeks pendidikan melalui pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mesuji menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Tinjauan Pustaka

Strategi

Strategi pada dasarnya dipahami sebagai arah dan pola tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka menengah dan Panjang (Wolf & Floyd, 2017). Dalam konteks organisasi publik, strategi berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menghubungkan antara tujuan kebijakan, sumber daya yang dimiliki, serta dinamika lingkungan yang dihadapi. Strategi tidak hanya berorientasi pada perencanaan, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan yang adaptif agar organisasi mampu merespons perubahan secara efektif (Salvador & Sancho, 2021).

Strategi juga dipandang sebagai proses yang bersifat berkelanjutan, dimulai dari perumusan tujuan, penentuan langkah operasional, hingga evaluasi terhadap hasil yang dicapai (Aldhaeri et al., 2020). Proses ini menuntut adanya keselarasan antara visi organisasi dengan implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, strategi yang baik harus mampu mengintegrasikan aspek internal, seperti kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, dengan faktor eksternal berupa peluang dan tantangan lingkungan (Prieto-Sandoval et al., 2019).

Dalam penelitian ini, strategi dipahami sebagai upaya terencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks pendidikan melalui kebijakan pendidikan kesetaraan (Liu et al., 2017). Strategi tersebut mencakup perencanaan program, pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi menjadi instrumen utama dalam mengarahkan berbagai kebijakan dan program agar mampu mencapai tujuan peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada dimensi pendidikan (Dai & Chen, 2023).

Indeks Pendidikan (Dimensi Pendidikan IPM)

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berfungsi untuk mengukur capaian pembangunan pada aspek pengetahuan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki akses dan kesempatan terhadap pendidikan yang layak (Dasic et al., 2020). Secara konseptual, pendidikan dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kesejahteraan individu (Guest, 2017).

Pengukuran indeks pendidikan umumnya didasarkan pada dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS mencerminkan peluang pendidikan yang dapat diakses oleh anak usia sekolah di masa depan, sedangkan RLS menunjukkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia dewasa. Kedua indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pendidikan suatu wilayah, baik dari sisi potensi maupun realisasi (Guijarro-Garvi et al., 2022).

Rendahnya capaian indeks pendidikan menunjukkan masih adanya permasalahan struktural dalam sistem pendidikan, seperti keterbatasan akses, rendahnya partisipasi sekolah, dan tingginya angka putus sekolah. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya IPM secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan indeks pendidikan menjadi agenda strategis dalam pembangunan daerah, terutama melalui kebijakan alternatif seperti pendidikan kesetaraan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal (Hickel, 2020).

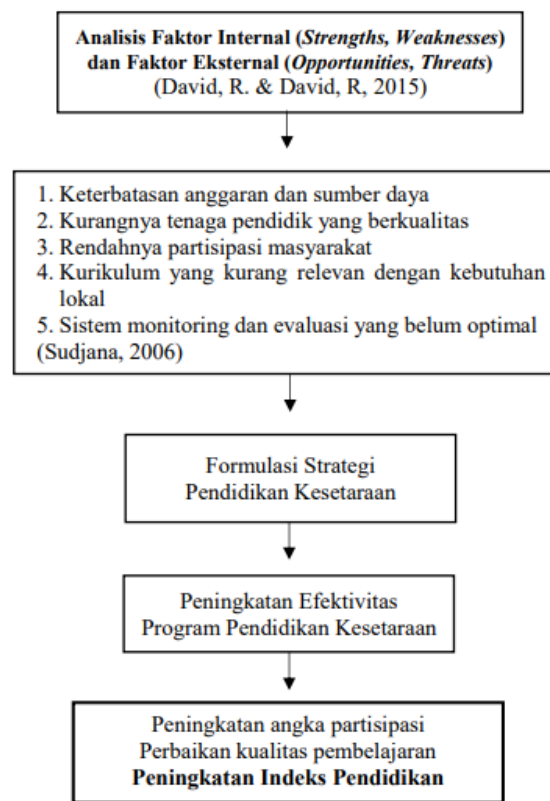
Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari jalur pendidikan nonformal yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan setara dengan pendidikan formal. Program ini bertujuan memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal akibat faktor ekonomi, sosial, geografis, maupun budaya. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C yang masing-masing setara dengan jenjang pendidikan dasar hingga menengah (Rosmilawati, 2023).

Keberadaan pendidikan kesetaraan memiliki peran strategis dalam mendukung prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan. Program ini bersifat fleksibel dari segi waktu, metode pembelajaran, dan pendekatan kurikulum, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dewasa maupun kelompok rentan. Dengan karakteristik tersebut, pendidikan kesetaraan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka anak tidak sekolah serta meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat (Kerr & Ainscow, 2022).

Dalam konteks peningkatan indeks pendidikan, pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai sarana intervensi kebijakan yang efektif, khususnya untuk meningkatkan indikator RLS. Melalui penguatan program pendidikan kesetaraan yang berkualitas, pemerintah daerah dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan capaian pembangunan manusia. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan tidak hanya dipandang sebagai program alternatif, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (Sunardi et al., 2022).

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap fenomena, proses, serta dinamika kebijakan pendidikan kesetaraan dalam upaya meningkatkan indeks pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menggali realitas empiris berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi, permasalahan, dan strategi yang dijalankan (Firman, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penyebaran kuesioner sebagai data pendukung. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive, meliputi unsur pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, tenaga pendidik, serta tokoh masyarakat yang memahami permasalahan pendidikan di wilayah penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen kebijakan, laporan program, serta data statistik yang relevan, sementara kuesioner dimanfaatkan untuk memperkuat temuan lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan konsistensi serta kredibilitas informasi yang diperoleh (Arikunto, 2017).

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan

pemahaman. Selanjutnya, analisis diperdalam menggunakan pendekatan SWOT dengan memanfaatkan matriks IFAS dan EFAS guna mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar perumusan strategi yang efektif dalam rangka meningkatkan indeks pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan.

Hasil dan Pembahasan

Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mesuji masih menghadapi berbagai kendala struktural dan non-struktural yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Kendala utama yang ditemukan berkaitan dengan keterbatasan dukungan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum optimal.

Dari aspek pembiayaan, program pendidikan kesetaraan belum sepenuhnya memperoleh dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Keterbatasan alokasi dana berdampak pada penyediaan sarana prasarana pembelajaran, insentif bagi tutor, serta pelaksanaan kegiatan pendukung seperti sosialisasi dan monitoring. Kondisi ini menyebabkan penyelenggara pendidikan kesetaraan, khususnya PKBM dan SKB, harus mengandalkan sumber daya yang terbatas dalam menjalankan program, sehingga kualitas layanan pendidikan menjadi kurang optimal.

Selain itu, tantangan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan. Sebagian besar masyarakat masih memandang pendidikan kesetaraan sebatas sebagai sarana administratif untuk memperoleh ijazah, bukan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas hidup. Pandangan tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kehadiran, motivasi belajar warga belajar, serta tingginya potensi putus belajar dalam program kesetaraan.

Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan jumlah dan kompetensi tutor juga menjadi kendala tersendiri. Tutor pendidikan kesetaraan belum seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik pendidikan orang dewasa. Hal ini mempengaruhi metode pembelajaran yang masih cenderung konvensional dan kurang kontekstual dengan kebutuhan warga belajar. Di samping itu, sistem monitoring dan evaluasi program belum berjalan secara maksimal, sehingga umpan balik terhadap pelaksanaan program belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi.

Interpretasi

Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mesuji menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial yang saling berkaitan, sehingga memerlukan pemaknaan dan interpretasi yang cermat untuk merumuskan solusi yang tepat. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kekurangan jumlah serta kompetensi tutor, keterbatasan infrastruktur pembelajaran, relevansi kurikulum, serta belum optimalnya evaluasi dan monitoring program. Pemahaman mendalam terhadap permasalahan tersebut menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan strategis dan pengembangan program yang adaptif serta berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran menjadi faktor fundamental yang memengaruhi hampir seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari penyediaan fasilitas, bahan ajar, hingga pengembangan sumber daya manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah, sehingga berdampak pada kualitas dan keberlanjutan program. Di sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat masih berfluktuasi karena tuntutan ekonomi dan rendahnya pemahaman terhadap manfaat jangka panjang pendidikan kesetaraan, sehingga diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih persuasif, kontekstual, dan berbasis komunitas.

Permasalahan lain yang menonjol adalah keterbatasan jumlah dan kualitas tutor, yang diperparah oleh minimnya program pengembangan kompetensi serta kebijakan rekrutmen yang belum fleksibel. Kondisi ini berdampak langsung pada mutu pembelajaran dan perhatian terhadap peserta didik. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana di PKBM turut memengaruhi motivasi belajar dan efektivitas proses pembelajaran, meskipun telah terdapat inisiatif pendanaan dari tingkat desa yang masih memerlukan perencanaan jangka panjang dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Dari sisi substansi pembelajaran, kurikulum pendidikan kesetaraan dipandang sebagai instrumen strategis yang harus bersifat fleksibel, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan dunia kerja lokal. Namun, efektivitas implementasi kurikulum ini belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi dan monitoring yang memadai. Minimnya kegiatan evaluasi menyebabkan sulitnya mengukur dampak program secara objektif. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, pengelola program, dan pemerintah dalam proses evaluasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan program pendidikan kesetaraan.

Analisis Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan Melalui Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan terhadap pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mesuji, diperoleh gambaran bahwa program ini memiliki peluang dan kekuatan yang cukup besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Ketersediaan regulasi nasional yang mendukung pendidikan nonformal, kebutuhan riil masyarakat terhadap layanan pendidikan alternatif, serta keberadaan lembaga pendidikan kesetaraan di tingkat lokal merupakan potensi strategis yang dapat dimaksimalkan.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa posisi strategi berada pada kuadran yang mengarah pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Strategi yang dapat diterapkan antara lain penguatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran dan kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, serta pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, strategi peningkatan indeks pendidikan melalui pendidikan kesetaraan perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah desa, dunia usaha, maupun tokoh masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga belajar, memperluas jangkauan program, serta meningkatkan relevansi hasil pembelajaran dengan kebutuhan kehidupan nyata. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pendidikan formal, tetapi juga sebagai instrumen

strategis dalam percepatan peningkatan indeks pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Mesuji.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mesuji belum berfungsi secara optimal dalam mendukung peningkatan indeks pendidikan. Berbagai kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, belum memadainya kualitas dan kuantitas tutor, keterbatasan sarana prasarana, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum berjalan efektif. Analisis SWOT menempatkan strategi peningkatan pendidikan kesetaraan pada kuadran pertumbuhan, yang menekankan pentingnya pemanfaatan kekuatan dan peluang yang tersedia untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Penerapan strategi ini dinilai relevan untuk mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen utama indeks pendidikan.

Sejalan dengan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat dukungan kebijakan terhadap pendidikan kesetaraan melalui peningkatan pendanaan, penguatan kapasitas lembaga penyelenggara, serta peningkatan kompetensi tutor. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait. Penguatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta sistem evaluasi yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pendidikan kesetaraan sebagai instrumen strategis dalam percepatan peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Mesuji.

Daftar Pustaka

- Aldhaheeri, F., Ameen, A., & Isaac, O. (2020). The Influence of Strategy Formulation (Vision, Mission, and Goals) on the Organizational Operations. *Journal of Critical Reviews*, 7(17), 2020.
- Anlimachie, M. A., & Avoada, C. (2020). Socio-economic impact of closing the rural-urban gap in pre-tertiary education in Ghana: context and strategies. *International Journal of Educational Development*, 77, 102236. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102236>
- Arikunto, S. (2017). *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*.
- Coccia, M., & Bellitto, M. (2018). Human progress and its socioeconomic effects in society. *Journal of Economic and Social Thought*, 5(2), 160–178. <https://doi.org/10.1453/jest.v5i2.1649>
- Dai, Y., & Chen, X. (2023). Evaluating green financing mechanisms for natural resource management: Implications for achieving sustainable development goals. *Resources Policy*, 86, 104160. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104160>
- Dasic, B., Devic, Z., Denic, N., Zlatkovic, D., Ilic, I. D., Cao, Y., Jermisittiparsert, K., & Le, H. Van. (2020). Human development index in a context of human development: Review on the western Balkans countries. *Brain and Behavior*, 10(9), 1–12. <https://doi.org/10.1002/brb3.1755>
- Firman, F. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.

- Ganguly, A., Talukdar, A., & Chatterjee, D. (2019). Evaluating the role of social capital, tacit knowledge sharing, knowledge quality and reciprocity in determining innovation capability of an organization. *Journal of Knowledge Management*, 23(6), 1105–1135. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2018-0190>
- Guest, D. E. (2017). Human resource management and employee well-being: towards a new analytic framework. *Human Resource Management Journal*, 27(1), 22–38. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12139>
- Guijarro-Garvi, M., Miranda-Escolar, B., Cedeño-Menéndez, Y. T., & Moyano-Pesquera, P. B. (2022). Education as a dimension of human development: A Provincial-level Education Index for Ecuador. *PLOS ONE*, 17(7), e0270932. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270932>
- Hickel, J. (2020). The sustainable development index: Measuring the ecological efficiency of human development in the anthropocene. *Ecological Economics*, 167, 106331. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.05.011>
- Kerr, K., & Ainscow, M. (2022). Promoting Equity in Market-Driven Education Systems: Lessons from England. *Education Sciences*, 12(7), 495. <https://doi.org/10.3390/educsci12070495>
- Liu, S., Liu, F., & Yu, Y. (2017). Educational equality in China: analysing educational policies for migrant children in Beijing. *Educational Studies*, 43(2), 210–230. <https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1248904>
- Mahu, S., Mutalib, A., & Abstract, S. A. (2025). The Role of Non-Formal Education Management in Community Empowerment and Lifelong Learning Development. *Agustus*, 2025(3), 514–518.
- Prieto-Sandoval, V., Jaca, C., Santos, J., Baumgartner, R. J., & Ormazabal, M. (2019). Key strategies, resources, and capabilities for implementing circular economy in industrial small and medium enterprises. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(6), 1473–1484. <https://doi.org/10.1002/csr.1761>
- Rosmilawati, I. (2023). Notions of Non-Mainstream Educational Provision: Understanding the Indonesia Equivalency Programs Among Established Alternative Education Throughout the World. *Jurnal Pendidikan Indonesia Gemilang*, 3(2), 323–336. <https://doi.org/10.52889/jpig.v3i2.297>
- Salvador, M., & Sancho, D. (2021). The Role of Local Government in the Drive for Sustainable Development Public Policies. An Analytical Framework Based on Institutional Capacities. *Sustainability*, 13(11), 5978. <https://doi.org/10.3390/su13115978>
- Sunardi, S., Djazuli, A., Handayani, R. D., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2022). The Role of Human Development in Improving Local Government Performance Through Good Government Governance. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 571–582. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.571-582>

- Winters, J. V. (2011). Human capital, higher education institutions, and quality of life. *Regional Science and Urban Economics*, 41(5), 446–454. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.03.001>
- Wolf, C., & Floyd, S. W. (2017). Strategic Planning Research: Toward a Theory-Driven Agenda. *Journal of Management*, 43(6), 1754–1788. <https://doi.org/10.1177/0149206313478185>